

PEMBELAHAN IDEOLOGI, KONTESTASI PEMILU, DAN PERSEPSI ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL: SPEKTRUM POLITIK INDONESIA PASCA 2014?

Ari Ganjar Herdiansah^a, Junaidi^b, dan Heni Ismiati^c

^aDepartemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

^bProgram Pascasarjana Sosiologi, Universitas Padjadjaran, Indonesia

^cProgram Pascasarjana Sosiologi, Universitas Padjadjaran, Indonesia

E-mail: ari.ganjar@unpad.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini berupaya menjelaskan bagaimana keterlibatan sentimen agama dalam ranah politik praktis dapat menciptakan persepsi ancaman keamanan di Indonesia pasca 2014. Beberapa pertanyaan yang akan coba dijawab antara lain mengapa pergesekan politik yang didorong oleh isu agama menjadi krusial pasca 2014? dan bagaimana persinggungan sentimen agama dan persaingan pemilu turut membentuk persepsi ancaman keamanan nasional? Penjelasan tulisan ini dibangun berdasarkan studi kepustakaan dan analisis berita seputar aksi protes di Jakarta sepanjang 2016-2017 dan dampaknya terhadap kemunculan isu-isu politik terkait RRT. Hasil studi ini menunjukkan bahwa isu politik dan agama pada 2016-2017 menjadi krusial akibat kulminasi dari pergulatan ideologi politik yang memanfaatkan pembelahan basis sosial berdasarkan ideologi. Peralihan poros kekuasaan pasca pemilu 2014 yang menempatkan kalangan nasionalis sekular di puncak kekuasaan membangkitkan kembali sentimen politik berdasarkan isu-isu agama. Menguatnya kekhawatiran tentang bangkitnya komunisme dan kedigdayaan Republik Rakyat Tionghoa (RRT) di Indonesia merupakan indikasi kuat bahwa pergolakan politik memantik kesadaran kolektif yang telah lama terkubur. Meskipun analisis politik aliran telah dianggap tidak relevan akibat menguatnya unsur kepentingan dalam pemilu, tetapi peristiwa friksi politik pasca 2014 menjadi indikasi bahwa politik aliran, dalam batas tertentu, masih berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: agama, politik, keamanan nasional, politik aliran

IDEOLOGICAL CLEAVAGE, ELECTORAL CONTESTATION AND THE PERCEPTION OF NATIONAL SECURITY THREAT: INDONESIA POLITICAL SPECTRUM IN THE POST 2014

ABSTRACT

This article attempts to explain how the involvement of religious sentiment in the realm of practical politics can create the perception of security threats in Indonesia after 2014. Some questions that will try to address are why the political friction that is driven by religious issues are crucial for the post-2014? And how the intersection of religious sentiments and electoral competition helped shape the perception of threat to national security? Explanation of this writing is built based on a literature study and analysis of news about protests in Jakarta during 2016-2017 and their impact on the emergence of political issues related to China. The results of this study indicate that the issue of politics and religion in 2016-2017 to be crucial due to the culmination of the battle of political ideologies which exploit social divisions based on an ideological basis. The transition of power after the 2014 elections shaft that puts secular nationalists in power to revive the political sentiment is based on religious issues. Heightened worries about the rise of communism and the superiority of the Chinese People's Republic (PRC) in Indonesia is a strong indication that political upheaval sparked the collective consciousness that has long been buried. Although the political analysis of the flow has been considered irrelevant due to the strengthening of the element of interest in the election, the events of the post-2014 political frictions be an indication that the political stream, within certain limits, still apply in Indonesia.

Keywords religion, politics, national security, aliran politics

PENDAHULUAN

Kehadiran kelompok dan organisasi yang menggunakan simbol-simbol keagamaan dalam politik masih menjadi ciri-ciri transisi demokrasi di Indonesia (Ghoshal, 2004). Sejak dimulainya era reformasi 1998 partisipasi politik masyarakat meningkat pesat, tetapi dengan bentuk respons yang beragam. Selain menjamurnya asosiasi atau organisasi swadaya masyarakat untuk mendorong demokratisasi, fenomena kemunculan kelompok berdasarkan identitas baik keagamaan maupun etnis tidak kalah kuatnya. Ratusan organisasi Islam telah didirikan untuk mengekspresikan orientasi ideologi politiknya dan turut mewarnai dinamika politik praktis (Inayatullah, 2009). Namun, kasus di Indonesia mencirikan gejala yang unik di mana pesatnya perkembangan kelompok-kelompok Islam tidak serta merta menjadi penghalang berarti bagi demokratisasi. Bahkan, partai-partai Islam turut berperan aktif dalam membangun demokratisasi di Indonesia (Mujani & Liddle, 2009).

Akan tetapi, hubungan yang harmonis, atau setidaknya tidak destruktif, antara politik dan agama di Indonesia mendapatkan tantangan pasca 2014. Beberapa peristiwa pergolakan politik yang melibatkan peran serta kelompok-kelompok Islam menjadi persoalan serius tentang arah baru hubungan antara politik dan agama. Pergesekan politik yang bermuatan sentimen agama terjadi secara signifikan yang memuncak di penghujung tahun 2016. Berbagai kelompok Islam turun ke jalanan ibukota melakukan aksi protes terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Aksi protes yang melibatkan ratusan ribu hingga jutaan orang itu menamakan aksi mereka sebagai Aksi Bela Islam yang dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada 17 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember 2016. Aksi tersebut tidak lepas dari konteks ajang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Permasalahan bermula ketika Basuki Tjahaya Purnama, atau yang dikenal Ahok dituduh melakukan penistaan agama dalam suatu pidato kedinasannya di Kepulauan Seribu. Tayangan video pidato Ahok kemudian menjadi viral di media sosial dan menyulut kemarahan sejumlah kelompok Islam di berbagai daerah. Berbagai kelompok Islam kemudian menggalang aksi protes pada bulan Oktober, November, dan Desember 2016 yang menuntut pemerintah supaya memproses

hukum Ahok atas tuduhan penistaan agama. Mereka antara lain Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (PNPF-MUI), dan puluhan organisasi Islam lainnya (Inilah.com, 2016).

Permasalahan kasus dugaan penistaan Islam oleh Ahok menggulirkan efek bola salju politik. Kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017 semakin panas dan penuh dengan sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Friksi seputar kasus Ahok, persaingan Pilgub DKI Jakarta, dan upaya penentang pemerintah telah menciptakan instabilitas politik sehingga menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Di saat yang bersamaan, pergolakan politik tersebut juga membangkitkan kekhawatiran akan bangkitnya komunisme dan dengan cara yang sulit dijelaskan turut memantik kesadaran tentang ancaman penguasaan perekonomian dan sumber daya alam Indonesia oleh RRT.

Artikel ini berupaya merangkai suatu penjelasan bagaimana keterlibatan sentimen agama dalam ranah politik praktis dapat menciptakan persepsi ancaman keamanan yang terkait dengan kebangkitan komunisme dan kedigdayaan RRT. Terkait dengan upaya penjelasan tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang akan coba dijawab di dalam artikel ini, antara lain mengapa pergesekan politik yang didorong oleh isu agama menjadi krusial pasca 2014? dan bagaimana persinggungan sentimen agama dan persaingan pemilu pasca 2014 turut membentuk persepsi ancaman keamanan nasional? Dalam rangka membangun penjelasan, artikel ini mengacu para kerangka teoretis, dengan kritik tentunya, tentang pemilahan basis sosial berdasarkan ideologi politik yang dikenal politik aliran yang berlaku dalam konteks budaya politik di Indonesia (Geertz, 1976; Uffen, 2006) dan bagaimana pola tersebut berpengaruh terhadap dinamika politik praktis.

Pembahasan akan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, tentang perdebatan dan relevansi politik aliran yang termanifestasi ke dalam konfigurasi partai politik yang senantiasa mengalami dinamika persaingan dalam pemilu sepanjang periode pemerintahan. Kedua, pembahasan tentang bagaimana peralihan poros kekuasaan pasca pemilu 2014 yang disertai isu-isu tentang identitas (etnisitas, agama)

membangkitkan kembali batasan-batasan basis sosial politik berdasarkan aliran. Ketiga, pembahasan tentang bagaimana kebangkitan politik aliran yang menumbuhkan posisi diametral antara nasionalisme kiri dan kanan Islam berdampak terhadap dinamika demokrasi yang juga turut membangun perspektif ancaman keamanan terutama yang berkaitan dengan eksistensi kekuatan modal RRT di Indonesia.

METODE

Analisis artikel ini dibangun melalui penelusuran dokumen, berita, dan hasil penelitian yang relevan terutama berkaitan dengan dinamika politik dan politik aliran di Indonesia. Penelusuran mengenai dinamika politik aliran sepanjang sejarah politik Indonesia kemudian dijadikan dasar peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bagaimana dimensi keamanan semakin dipengaruhi oleh pertentangan ideologi politik yang sebenarnya dibawa-bawa oleh friksi beberapa elite. Kerangka analisis dilakukan secara deskriptif-kronologis dimulai dari pola pembelahan basis ideologi sejak Orde Baru hingga pasca 2014. Tetapi penekanan peristiwa difokuskan pada pasca 2014, di mana persepsi kekuasaan berada di kalangan PDIP dan basis-basis kelompok pendukungnya yang berhaluan nasionalis-kiri sehingga menyebabkan riak-riak pertentangan dari berbagai kelompok Islam. Peristiwa politik regional di kawasan Asia Tenggara, khususnya tentang menguatnya pengaruh Tiongkok secara militer dan ekonomi menjadi pembahasan yang menunjukkan keterkaitan sentimen politik-keagamaan dan pertentangan ideologis basis massa yang menambah hakikat ancaman keamanan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelahan Ideologi Dalam Transisi Rezim Di Indonesia

Politik aliran diperkenalkan sebagai kerangka teoretis dari Clifford Geertz untuk menjelaskan pemilahan karakteristik masyarakat di Jawa yang terkait dengan kecenderungan ideologi politik. Geertz memilah-milah masyarakat Jawa ke dalam tiga kelompok kategori yaitu santri, abangan, dan priyayi. Kelompok santri merupakan golongan yang mempelajari ajaran Islam secara intensif dan mempraktikkan nilai serta tradisi Islam di dalam kehidupan sehari-harinya. Kaum santri biasanya ber-

kembang di institusi pendidikan Islam yang bernama pesantren. Kelompok abangan merepresentasikan masyarakat yang meskipun berasal sebagian besarnya dari kalangan Muslim tetapi memilih untuk tidak menonjolkan aspek keagamaan (Islam) dalam kehidupan sosial dan politiknya. Kaum abangan lebih tertarik untuk mengadopsi gagasan-gagasan politik universal yang tidak terkait dengan ajaran agama (Islam). Sementara kelompok priyayi merepresentasikan nilai-nilai golongan aristokrasi Jawa yang pandangan religiusnya masih menjalankan nilai-nilai Hindu. Mereka biasanya menempati posisi struktur pemerintahan dan memegang kekuasaan otoritatif.

Pola pemilahan basis ideologi politik atau aliran telah lama mendapatkan kritik karena dinilai kurang akurat bahkan untuk menganalisis pemilu 1955 sekalipun (Watson, 2004). Skema teori politik aliran terlalu menyederhanakan struktur sosial masyarakat di Indonesia yang kompleks. Selain yang dikategorikan sebagai santri, abangan, dan priyayi, terdapat karakteristik lain yang tidak dapat digolongkan secara simplistik ke dalam tiga golongan tersebut. Perkembangan sosial politik berlangsung justru semakin mengaburkan konsepsi politik aliran. Azra (2004), misalnya, tidak melihat adanya indikasi politik aliran dalam pemilu 2004. Ia berkesimpulan bahwa dinamika politik yang digerakkan oleh kompetisi pemilu di Indonesia semakin ditentukan oleh kepentingan, sehingga analisis politik aliran semakin tidak relevan untuk digunakan lagi.

Namun demikian, artikel ini berpandangan bahwa pada batasan tertentu, konsepsi politik aliran masih relevan dalam menjelaskan konfigurasi elite politik dan basis ideologi massa di Indonesia. Dalam konfigurasi partai politik, meskipun di tingkat elite mereka terdorong untuk bertindak pragmatis, tetapi di kesempatan lain partai-partai seringkali memanfaatkan isu-isu dan identitas agama untuk menarik simpati. Partai-partai Islam akan terus berupaya untuk menyimbolkan diri, walau tidak membatasi diri, sebagai representasi kalangan santri dan orientasi kebijakan yang pro terhadap syariat atau pro mendudukkan Islam dalam politik (Pepinsky, Liddle, & Mujani, 2012).

Dalam upaya memahami bagaimana sentimen agama dapat menjalar secara kolektif dalam dinamika politik, perlu kiranya mengulas tentang sejarah politik Indonesia modern yang

diwarnai oleh perbedaan landasan ideologi yang hingga saat ini masih mempengaruhi pembelahan poros kekuatan politik. Berdasarkan klasifikasi partai yang menggunakan skema aliran politik, golongan santri diwakili oleh partai Islam. Pada era Orde Lama terdapat beberapa partai Islam terkemuka seperti Partai Masyumi, Partai NU, dan Partai Tarbiyah Indonesia. Di era Orde Baru, pada tahun 1973, Suharto melakukan fusi partai-partai menjadi tiga partai demi menciptakan stabilitas politik. Partai-partai Islam pada waktu itu digabungkan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Setelah reformasi 1998, partai-partai Islam menjamur tetapi terus berkurang akibat tidak mampu bersaing meraih suara pemilu. Beberapa partai Islam yang bertahan hingga pemilu 2014 adalah PKS, PPP, PAN, PKB, dan PBB, dengan catatan PAN dan PKB tidak berasaskan pada Islam tetapi memiliki akar pendukung dari dua organisasi Islam terbesar, yakni Muhammadiyah dan NU.

Golongan abangan diidentikkan dengan partai nasionalis kiri yang di era Orde Baru diwakili oleh Partai Murba dan PKI. Pada Orde Baru, PKI sudah dibubarkan oleh pemerintah, sedangkan PNI, Partai Murba, dan partai-partai Kristen digabungkan menjadi Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) yang banyak diintervensi oleh rezim Suharto (Ufen, 2006). Pada era reformasi, Megawati Sukarnoputri mendirikan PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak tunduk kepada Suharto. Di era reformasi, partai yang paling dikenal berhaluan sekular dan dekat dengan gagasan kiri adalah PDIP karena sejarah mereka yang merupakan penggabungan partai-partai nasionalis, sosialis, dan Kristen (Singh, 2003). Sementara kalangan priyayi sulit untuk diidentikkan dengan partai tertentu. Dengan karakteristik nilai-nilai aristokrasi Jawa, barangkali Partai Golkar di era Suharto memiliki ciri yang paling dekat dengan golongan priyayi. Namun, sekali lagi perlu diingat bahwa pemilahan-pemilahan partai berdasarkan politik aliran memang terlalu mengeneralisir dan menyesatkan apabila konteks pembahasannya tidak diuraikan secara jelas. Dalam artikel ini, klasifikasi ideologi tersebut digunakan untuk melihat korelasinya dengan aspek sosiologis dari akar massa pendukung partai atau tokoh politik.

Skema politik aliran juga tercermin dalam penyatuan partai oleh Soeharto untuk menguasai

dan mengendalikan lawan-lawan politiknya pada 1973. Partai-partai yang berhaluan nasionalis-sekuler maupun Islam diperbolehkan sebagai formalitas demokrasi. Ideologi yang di anut oleh kedua partai pesaingnya tidak terlepas dari pengamatan penguasa pada saat itu. Orang-orang rezim penguasa senantiasa hadir sebagai pendukung pemerintah di dalam kedua partai yang berlawanan ideologi tersebut. Politik rezim Orde baru menerapkan politik kultural untuk meredam lawan politiknya oposisi (Budiman, 2006). Meskipun pemerintah Orde Baru memecah kekuatan politik berdasarkan ideologi basis pendukungnya, ideologi politik lain selain dari Pancasila tidak diperbolehkan berkembang. Upaya ini ditujukan untuk menciptakan kondisi politik yang stabil dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan kekuasaan rezim.

Namun demikian, kekuatan ideologi sekuler kiri dan Islamis tidak benar-benar habis. Sebagian dari mereka tetap bergerilya secara tersembunyi. Megawati terus berjuang melawan intervensi Suharto pada PDI dan berhasil menggagalkan kekuatan di 1990an. Muncul juga kekuatan muda dari golongan kiri yang kemudian akan melahirkan Partai Rakyat Demokrat (PRD) yang digerakkan oleh FX Rudi Gunawan dan Budiman Sudjatmiko. Sementara itu elemen-elemen pergerakan dari kalangan Islamis mengembangkan sel-sel di kampus (seperti yang ditunjukkan oleh cikal bakal PKS) untuk menghindari sikap represif rezim Suharto. Semangat eksistensi mereka tersulut oleh peristiwa revolusi Islam dan kebangkitan gerakan Islam muda di Timur Tengah pada 1970an. Di penghujung 1990an, mereka mendirikan partai politik (PKS) dan turut serta dalam kekuatan besar dalam menentang rezim Orde Baru. Krisis ekonomi yang menghantam sejak 1997 menjadi katalis kebangkitan kelompok-kelompok oposisi Orde Baru, termasuk dari kalangan berhaluan nasionalis kiri dan Islamis.

Pada 1998, kekuatan nasionalis-sekular yang selama pemerintahan Orde Baru mengalami tindakan represif kemudian bangkit. Megawati, yang sejak pertengahan 1990an memobilisasi gerakan perlawanan terhadap Orde Baru, kemudian mendirikan PDI Perjuangan. Pada Pemilu 1999, PDIP di bawah komando Megawati langsung mendapatkan suara 34 persen dan memenangkan pemilu pada saat itu. Partai Golkar yang menjadi pesakitan selama aksi reformasi ternyata masih mendapatkan

kepercayaan dari pemilih dan menduduki peringkat ke dua dalam pemilu, yaitu dengan 22,4 persen suara. Sementara partai-partai Islam marak bermunculan. Di antara lusinan partai Islam dan berbasis Muslim, beberapa yang utama adalah PPP, PAN, PKB, PBB, dan PK (kemudian menjadi PKS).

Meskipun mendapatkan status sebagai pemenang pemilu, PDIP gagal menempatkan ketua umumnya Megawati sebagai presiden. Hal tersebut disebabkan sejumlah partai Islam yang didukung oleh Partai Golkar menggalkan kekuatan bersama yang mengusung Abdurrahman Wahid, dari PKB, sebagai presiden. Megawati kemudian didaulat menjadi wakil presiden. Alasan penjegalan Megawati bernuansa agama. PPP mengatakan bahwa presiden dari kalangan perempuan tidak dapat diterima dalam teologi Islam sejak suatu hadis mengatakan pemimpin dari laki-laki harus diutamakan. Tetapi di balik itu, kekhawatiran munculnya kekuatan kiri seiring berkuasanya PDIP juga menjadi alasan kuat. Sejak tahun 1994, terdapat tuduhan kepada Megawati bahwa partai PDI telah diinfiltrasi oleh elemen-elemen komunis (Eklof, 2004)

Sementara kalangan Islam di Indonesia memiliki trauma sejarah dengan para pendukung komunis. Sebelum tragedi pemberontakan PKI pada September 1965, terjadi pembantaian-pembantaian berdarah yang dilakukan oleh pemberontak PKI terhadap ulama-ulama pada 1948 yang dibalas dengan pembantaian terhadap PKI pada 1965. Namun pada 1998 terjadi tragedi pembantaian dukun santet di Banyuwangi terhadap orang-orang Islam. Muncul suatu kesimpulan bahwa pihak yang berada di belakang tragedi itu adalah keturunan-keturunan PKI yang dendam terhadap ulama (Wardhana, Manan, & Atmadja, 2001), yang menandakan memori permusuhan antara PKI-Islam tidak luntur.

Periode Abdurrahman Wahid berlangsung singkat, hanya dua tahun. Ironisnya, ia digulingkan oleh sebagian besar pendukungnya di pemilihan presiden 1999. Beberapa penyebabnya adalah dugaan skandal Bulog yang melibatkan Wahid. Tetapi selain itu, faktor politis diduga menjadi penyebab utamanya, yaitu ketidaksinkronan Wahid dengan komponen-komponen pendukungnya yang sudah tidak dapat diatasi lagi. Wahid membuka jalan diplomasi dengan Israel dan mengusulkan untuk menghapus Tap MPRS XXV tahun

1966 tentang pelarangan ajaran komunisme dan Marxisme. Kedua langkah tersebut sangat ditentang oleh kalangan Islam. Sementara itu, partai-partai lainnya merasa gerah dengan beberapa kebijakan pemerintahan Wahid yang mengabaikan kepentingan politik mereka. Posisi presiden kemudian dijabat oleh Megawati dan wakil Presidennya adalah Hamzah Haz, dari PPP, yang sebelumnya amat menentang pencalonan Megawati dengan alasan teologisnya. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa isu agama masih menjadi faktor penting dalam friksi politik yang mendorong pergantian rezim.

Pemerintahan Megawati pun tidak berlangsung lama setelah kalah dalam Pemilu 2004 yang dilakukan secara langsung. Pada putaran pertama terdapat lima pasang calon yaitu Wiranto-Solahudin Wahid (Partai Golkar), Megawati-Hasyim Muzadi (PDIP), Amin Rais-Siswono (PAN), Yudhoyono-Jusuf Kalla (Partai Demokrat, PBB, PKPI), dan Hamzah Haz-Agung Gumelar (PPP). Menariknya para kandidat didominasi oleh tokoh berlatar belakang organisasi keagamaan terkemuka. Solahudin Wahid, Hasyim Muzadi, Hamzah Haz berasal dari kalangan NU. Sementara Amien Rais pada waktu itu merupakan ketua umum Muhammadiyah. Konfigurasi tokoh Islam pada kandidat Pilpres menunjukkan representasi Muslim masih kuat dalam konteks pemilu, tetapi mencair dengan kalangan nasionalis sekuler. Seperti pada pasangan Megawati-Hasyim Muzadi (PDIP-NU) dan Amien Rais-Siswono (PAN/Muhammadiyah-GMNI¹).

Pada putaran pertama, pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawati-Hasyim Muzadi mengungguli kandidat-kandidat lainnya dengan suara 33,57 persen dan 26,62 persen. Menjelang putaran kedua terjadi pengelompokan partai pendukung pada kedua kandidat. Pada barisan Megawati-Hasyim Muzadi terdapat PDIP, Partai Golkar, PPP, PBR, PDS, PNI Marhaenisme, PKPB dengan total suara 54,75 persen. Sementara Yudhoyono-Jusuf Kalla hanya mendapatkan tambahan dukungan dari PKS. Meskipun PKB dan PAN tidak menyatakan dukungan secara resmi, tetapi suara mereka mengalir ke Yudhoyono-Jusuf Kalla (Pusat Penelitian Politik LIPI, 2004).

¹ Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) merupakan organisasi masyarakat yang berafiliasi kepada Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dikenal dekat dengan orientasi ideologi nasionalis-kiri (Wardaya, 2009: 212). Setelah reformasi, GMNI kemudian menjadi lebih dekat atau berafiliasi dengan PDIP.

Meskipun dikotomi santri-sekuler telah mencair dalam tataran institusional, upaya-upaya perebutan dukungan basis massa Muslim masih berlangsung dengan keras. Megawati berupaya mendapatkan dukungan dari kalangan Islam tradisional dengan menggandeng Hasyim Muzadi, tokoh NU, sebagai kandidat wakil presiden. Namun, dukungan NU terpecah setelah Abdurrahman Wahid memerintahkan anak-anak perempuannya menemani Yudhoyono berkunjung ke beberapa pesantren besar. Di sisi lain, berdasarkan hasil poling pasangan Megawati-Hasyim Muzadi kurang memungkinkan memenangkan pemilu. Watak golongan NU yang pragmatis dan lebih memilih di pihak yang paling berpeluang menang telah mengalirkan dukungan pemilih muslim tradisional terhadap Yudhoyono (Mietzner, 2009: 279). Dengan dukungan dari basis massa PAN dan PKS, Yudhoyono berhasil menyatukan basis dukungan Muslim tradisional dan modernis yang turut mengantarkannya memenangkan pemilu dengan raihan 60,62 persen suara. Yudhoyono-Jusuf Kalla kemudian membangun pemerintahan yang terdiri dari hampir semua partai besar dan menengah, kecuali PDIP.

Menjelang pemilu 2009, popularitas dan elektabilitas Yudhoyono masih tidak tertandingi. Ia menjadi magnet bagi partai-partai lain untuk menjadi bagian pendukungnya. Yudhoyono berpasangan dengan Budiono yang didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PKB, PKNU, PPP dan PBB. Sementara dua pasangan kandidat lainnya yaitu Megawati-Prabowo diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra dan Jusuf Kalla-Wiranto diusung oleh Partai Golkar, PAN, dan Hanura. Menariknya, sebagian besar partai-partai Islam berada di barisan Yudhoyono-Budiono yang kemudian memenangkan pemilu dengan suara 60,8 persen. Namun, hasil tersebut sama sekali tidak menandakan daya tarik partai-partai Islam pada ajang pemilu 2009. Sebaliknya, suara partai-partai Islam dalam pemilu legislatif 2009 justru mengalami penurunan yaitu menjadi 29 persen dari 37 persen di pemilu sebelumnya. Faktor utama kemenangan Yudhoyono-Budiono adalah elektabilitas Yudhoyono yang kokoh di berbagai *polling* (Firmanzah, 2011).

Menurut Aspinall (2010), kemunduran elektoral partai-partai Islam dalam pemilu 2009 menandakan luntarnya politik aliran. Menguatnya peran media massa dan model-

model kampanye yang modern dan kreatif melemahkan perilaku pemilih berdasarkan identitas kolektif. Partai-partai dengan citra identitas kolektif yang kuat, seperti PDIP dan PKB, mengalami penurunan suara yang drastis. Indikasi lain melemahnya politik aliran adalah berhasilnya partai-partai yang menggunakan pesona personal yang kuat, seperti Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Periode 2009 menunjukkan kebangkitan pola pemilih individual yang merujuk pada karakter kandidat.

Tetapi, politik aliran bukan berarti tidak lagi berlaku, setidaknya di basis massa. Sikap bersahabat Yudhoyono terhadap partai-partai Islam dan ormas-ormas Islam menunjukkan bahwa politik aliran masih dianggap sebagai *variable* penting dalam menjaga keseimbangan dukungan politik terhadap pemerintah. Bertahannya PDIP sebagai partai non-pemerintah dan cenderung bersikap sebagai partai oposisi memberikan dampak menguatnya kembali tanda-tanda politik aliran menjelang pemilu 2014.

Jokowi, Kebangkitan PDIP, Dan Respons Kelompok-Kelompok Islam

Politik aliran, meskipun semakin kabur dalam pola pemilu, tetapi seperti yang kita lihat pada periode reformasi ternyata tetap mengambil peran dalam menarik simpulan-simpulan basis massa. Pada periode 2014-2019, pembelahan ideologi yang menyeret basis massa (tidak pada tataran elite), semakin tampak. Hal tersebut disebabkan pergeseran poros kekuasaan yang menempatkan PDIP sebagai patron koalisi partai di pemerintahan setelah mereka memenangkan pemilu 2014 dan menempatkan kadernya, Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.

Menjelang Pilpres 2014, PDIP mengusung Jokowi yang dipasangkan dengan Jusuf Kalla. Pasangan Jokowi Widodo-Jusuf Kalla diusung oleh PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, dan PKPI. Jokowi yang pernah menjadi walikota Solo selama dua priode dan Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun memiliki elektabilitas yang mengungguli tokoh-tokoh nasional, mulai dari Aburizal Bakrie (ketua umum Partai Golkar), Prabowo Subianto (ketua umum Partai Gerindra), dan bahkan Megawati (ketua umum PDI Perjuangan). Di pihak lain, pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, dan sebagian besar partai Islam

yaitu PAN, PKS, PPP, dan PBB. Secara garis besar, basis pendukung Prabowo-Hatta terdiri dari kalangan agamis yang konservatif. Partai Golkar pun banyak didukung oleh kalangan agamis (Herdiansah, 2015).

Nuansa Islamis pada kubu Prabowo-Hatta semakin kentara apabila melihat histori biografi Prabowo yang dikenal sebagai tentara yang agamis atau TNI hijau. Ia dikenal sebagai tokoh TNI yang dekat dengan tokoh-tokoh Islam, seperti dari DDII. Sementara Hatta Rajasa merupakan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) dari Palembang, Sumatera Selatan. Dari posisinya sebagai ketua umum PAN pada saat itu ditambah dengan berasal dari tokoh ICMI membuat Hatta mendapat dukungan secara penuh dari organisasi Islam Muhammadiyah. Di kubu Jokowi-Jusuf Kalla, terdapat PKB sebagai partai Islam dengan basis massa dari Nahdiyin, sebutan bagi kalangan NU. Jusuf Kalla pun merupakan tokoh Partai Golkar yang dekat dengan kalangan NU. Namun, basis massa dari PDIP dan relawan Jokowi lebih mendominasi saat kampanye Pilpres, sehingga branding image Jokowi sangat menonjol. Mempertimbangkan konfigurasi basis massa, nuansa pendukung dari kalangan kelompok Islam lebih kuat melekat pada kubu Prabowo-Hatta dibandingkan dengan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

Konfigurasi basis massa pendukung kandidat Pilpres seolah-olah menempatkan kubu agamis konservatif dan nasionalis liberal berada pada posisi diametral. Latar belakang itulah yang menyebabkan pertentangan antara pendukung Jokowi-Jusuf Kalla dengan Prabowo-Hatta seringkali menyinggung soal agama terutama dalam perang urat syaraf di media sosial. Jokowi sering dicitrakan sebagai sosok yang anti-Islam, keturunan Tionghoa, dan berasal dari keluarga simpatisan PKI (Tribunnews.com, 2014).

Pilpres 2014 kemudian dimenangkan oleh Jokowi-Jusuf Kalla dengan keunggulan suara 53,15 persen dari pasangan Prabowo-Hatta dengan raihan 46,85 persen suara. Setelah menjalankan roda pemerintahannya, Jokowi-JK segera melakukan konsolidasi terhadap organisasi-organisasi sipil Islam, terutama NU dan Muhammadiyah. Beberapa kader NU mengisi pos-pos kementerian kabinet Jokowi-JK, seperti Khofifah Indar Parawansa, Lukman Hakim Saifuddin, Marwan Ja'far, Imam Nahrawi, dan Muhammad Hanif Dhakiri,

Muhammad Nasir, Nusron Wahid (Tempo.Co, n.d.) Sementara kader dari Muhammadiyah yang duduk di kabinet Jokowi adalah Nina Moeloek dan Muhajir Effendy. Jokowi tidak melepaskan pentingnya dukungan dari organisasi-organisasi sipil Islam terhadap stabilitas pemerintahannya. Dukungan Muhammadiyah terhadap pemerintahan Jokowi memang tidak begitu besar yang salah satunya disebabkan oleh sikap Amien Rais yang kerap mengkritisi pemerintah.

Jokowi pun melakukan pendekatan ke beberapa partai yang berada di koalisi KMP. Pendekatan itu berhasil dilakukan dengan bergabungnya beberapa partai yang ada di KMP. Partai Golkar dan PAN kemudian keluar dari KMP dan mendukung pemerintah. Kedua partai tersebut bahkan mendapatkan jatah posisi struktural di pemerintahan (Herdiansah, 2015). Airlangga Hartanto (Partai Golkar) didaulat menjadi menteri perindustrian dan perdagangan dan Sutrisno Bachir (PAN) menjadi Ketua Komisi Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Bahkan partai Golkar dalam kongresnya yang terakhir secara terang-terangan mendukung Jokowi sebagai calon presiden di tahun 2019 mendatang.

Namun, sebagian kelompok Islam tetap mencurigai tindakan pemerintah yang condong pada sekularisasi. Contohnya, ketika Menteri Dalam Negeri, Tjahjoe Kumolo mengusulkan untuk menghapus kolom agama pada kartu identitas penduduk untuk menciptakan keadilan bagi semua pemeluk agama, termasuk pemeluk kepercayaan lokal (Hamayotsu, 2015, pp. 182-183). Akan tetapi, upaya tersebut mendapatkan pertentangan dari kelompok-kelompok Islam yang berhaluan konservatif. Misalnya, PBNU menolak rencana penghapusan kolom agama karena akan membiarkan kebebasan menjadi liar (NUOnline, n.d.).

Jokowi kemudian berupaya menetralkan opini negatif dari kelompok-kelompok Islam terhadap pemerintahannya. Pada 2015 dan 2016, ia melakukan safari kunjungan ke sejumlah pesantren di Solo, Surabaya, Cirebon, Tegal, dan Serang (Antarnews.com, 2015). Selain itu, Jokowi mendukung peresmian Universitas Islam Internasional Indonesia pada 29 Juni 2016, institusi perguruan tinggi yang akan berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kompas.com, 2016). Berbagai upaya tersebut mengindikasikan bahwa Jokowi menganggap

penting dukungan dari elemen-elemen Islam demi terpeliharanya stabilitas politik.

Friksi Politik-Agama dalam Kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017

Memasuki pertengahan 2016, isu politik terpusat pada Pemilihan Gubernur Jakarta yang diikuti oleh tiga kandidat. Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful yang diusung oleh PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem. Di pihak lain, terdapat dua lawan Ahok-Djarot yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana yang didukung oleh Partai Demokrat, PKB, dan PPP, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS.

Isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) seputar Pilgub DKI Jakarta sudah mulai nampak dalam respons masyarakat di berbagai media, khususnya media sosial. Isu-isu yang dikembangkan menjadi peluru untuk menjatuhkan Ahok antara lain soal larangan bagi Muslim dalam memilih pemimpin kafir dan bahaya dominasi etnis Tionghoa di Jakarta. Serangan balik yang dilakukan Ahok terhadap isu rasisme yang mengarah kepadanya justru mempertajam friksi. Ujaran Ahok di Kepulauan Seribu kemudian menjadi viral di dunia maya dan sontak menuai reaksi publik (Tirto.id, 2016). Pada tanggal 7 oktober 2016, Ahok dilaporkan kepada polisi atas dugaan melakukan tindak pidana penghinaan agama. Reaksi kelompok-kelompok Islam atas dugaan penistaan agama oleh Ahok semakin intensif dan meluas. Pada 10 Oktober 2016, Ahok kemudian menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya tersebut meskipun merasa dirinya tidak bersalah karena ucapannya tidak dimaksudkan melecehkan Islam. Namun, kelompok-kelompok Islam tetap tidak menerima dan mendesak aparat hukum agar memproses Ahok

Berbagai aksi protes yang menuntut proses hukum terhadap Ahok kemudian dilakukan di berbagai daerah, seperti di Jakarta, Medan, Surabaya, Tegal, Solo, dan Sampit. Pada pertengahan Oktober 2015, ribuan massa dari berbagai organisasi sipil Islam turun kejalan mengemukakan pernyataan Ahok yang dianggap menistakan al-Quran dan mendesak kepolisian untuk segera memenjarakan Ahok. Terdapat pro kontra di masyarakat menanggapi apakah Ahok benar-benar melakukan penistaan agama. Para penuntut Ahok yakin bahwa ucapan Ahok tersebut, terlepas dari konteks apapun, telah

melecehkan al-Quran, sedangkan pihak lain menganggap ucapan Ahok tidak menistakan al-Quran, sebab yang ia maksudkan adalah orang-orang yang menggunakan ayat-ayat al-Quran untuk menghasut pemilih. Akan tetapi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian mengeluarkan fatwa bahwa ucapan Ahok masuk ke dalam kategori penistaan agama (Republika.co.id, 2017b).

Berbagai organisasi Islam yang dikoordinasi oleh FPI dan GNPf-MUI melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar pada hari Jumat 14 oktober 2016. Sekitar sepuluh ribu orang turut serta dalam aksi tersebut. Aksi yang diberi nama Aksi Bela Islam tersebut melakukan *long march* dan berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Para demonstran menuntut pihak kepolisian untuk memproses laporan terkait Ahok (Tribunnews.com, 2016). Meski telah melakukan aksi demo besar pada 14 oktober, tetapi kelompok-kelompok Islam merasa tidak puas dan menganggap proses hukum lambat sehingga terkesan dilindungi oleh kekuasaan. Kemudian, aksi demo Aksi Bela Islam kembali digelar kedua kalinya pada 4 november 2016 yang bertajuk Aksi Bela Islam II (411) yang menuntut Polri untuk menangkap Ahok dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Para peserta demo yang berjumlah ratusan ribu orang berkumpul di Masjid Istiqlal dan bergerak menuju markas kepolisian, Istana Merdeka dan Balai Kota. Mereka memenuhi setiap sudut kawasan Bundaran Patung Kuda hingga Medan Merdeka. Peserta yang mengikuti aksi damai tersebut diikuti oleh ratusan ribu umat Islam dari berbagai daerah, seperti dari Bandung, NTB, Makasar, Palembang, Maluku, Madura, Surabaya, Lampung dan Yogyakarta.

Setelah terlaksananya Aksi Bela Islam II (411), muncul kembali aksi lanjutan yang diberi nama Aksi Bela Islam jilid III yang lebih dikenal sebagai aksi damai 212. Terlaksananya Aksi Bela Islam jilid III diumumkan sebelumnya oleh GNPf MUI. Aksi tersebut berpusat di Silang Monas dan meluber hingga ke Tugu Tani, kawasan Kwitang, Bundaran HI sampai Jalan Thamrin. Semua kawasan tersebut dipenuhi oleh jemaah umat Islam yang melakukan aksi damai. Sebelum aksi itu terlaksana, pemerintah menolak keras aksi tersebut, karena menurut pemerintah Ahok telah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian. Bahkan Kapolri

Jendral Tito Karnavian mencurigai bahwa aksi tersebut merupakan aksi yang ditunggangi kelompok tertentu untuk melakukan makar (Kini.col.id, 2016).

Buntut dari tuduhan tersebut, pagi hari sebelum aksi terlaksana pihak kepolisian menangkap beberapa orang aktivis, antara lain Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri, dan Sri Bintang Pamungkas. Mereka diduga terlibat dalam rencana makar dan melanggar UU Informasi Teknologi Elektronik (ITE) serta penghinaan terhadap presiden (Detik.com, 2016). Penangkapan tokoh dan aktivis yang selama ini dikenal kritis pemerintah menandakan terjadi upaya antisipasi untuk meredam gerakan aksi protes tidak berlanjut atau berkembang secara kuat.

Dari peristiwa friksi politik seputar Pilgub DKI Jakarta 2017 yang melibatkan isu agama, kita dapat melihat bagaimana kelompok-kelompok Islam dapat bergerak secara massif dan intensif. Hal yang tidak dapat dipungkiri dalam peristiwa tersebut menggambarkan bagaimana kontestasi pemilu yang bersinggungan dengan isu keagamaan, atau sebaliknya, telah membawa dampak yang signifikan terhadap persepsi keamanan nasional.

Pengaruh Bayang-Bayang Kekuatan Republik Rakyat Tiongkok

Kulminasi politik aliran dalam dinamika politik pasca 2014 dapat dilihat dengan jelas ketika muncul isu-isu tentang kebangkitan komunisme dan kekhawatiran cengkraman RRT akan menyisihkan kaum pribumi di Indonesia. Kekhawatiran tersebut tidak muncul tiba-tiba, tetapi berkaitan dengan meningkatnya kekuatan RRT dengan pesat dalam kurung satu dasawarsa terakhir dan turut mempengaruhi orientasi ekonomi Indonesia.

RRT telah bertransformasi menjadi salah satu penguasa ekonomi dan militer dunia dan diprediksi akan mencapai puncaknya di tahun 2027 (Jaques, 2011). Kebangkitan RRT sebagai salah satu negara terkuat membuat RRT melakukan ekspansi secara politik dan ekonomi di berbagai kawasan untuk bisa menyaingi Amerika Serikat (AS). Perebutan pengaruh anatara kedua negara besar tersebut hingga ke percaturan politik negara-negara di dunia,

termasuk kawasan Asia, yaitu Indonesia. Kedua negara adidaya ekonomi itu sama-sama melihat Asia sebagai ladang ekonomi di masa depan. Perebutan pengaruh tersebut masuk hingga ke Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) di mana organisasi tersebut sebagai ajang perebutan pengaruh ekonomi antara AS dan RRT. Strategi memenangkan pengaruh yang dilakukan oleh AS melalui dimainkannya kesepakatan perdagangan bebas Trans Pacific Partnership (TPP), sedangkan RRT mengeluarkan jurus Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP) dan Jalan Sutra Baru. Hal ini membuat posisi Indonesia menjadi menarik sekaligus delematis antara mengejar keuntungan dan kemandirian negara (Republika.co.id, 2017a).

Dalam laporan Litbang MNC disebutkan bahwa secara ekonomi kekuatan RRT di pusran ekonomi dunia sangat luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan delapan kekuatan ekonomi RRT yang dimiliki. Delapan kekuatan itu, yaitu: 1) RRT merupakan negara dengan tingkat konsumen minyak terbesar kedua dunia; 2) RRT menjadi negara dengan tingkat konsumen batu bara terbesar di dunia; 3) RRT sebagai negara pemegang surat utang Amerika terbesar pertama; 4) RRT dijadikan sebagai mitra terbesar Indonesia, dalam tujuan ekspor terbesar kedua setelah Amerika Serikat; 5) RRT adalah pasar terbesar bagi komoditi mineral dan batu bara di dunia; 6) RRT sejak lama membiarkan nilai tukar mata uangnya rendah terhadap dolar Amerika Serikat yang dijadikan sebagai senjata utama untuk menggenjot ekspor; 7) RRT merupakan negara yang memiliki cadangan devisa terbesar dunia, diperkirakan lebih dari USD 3 triliun; dan 8) Kegiatan ekonomi RRT mengakar di berbagai kawasan dan sektor industri di dunia (Okezone.com, 2015).

Keberhasilan ekonomi ini turut berpengaruh terhadap kekuatan militer RRT yang mulai di bangun. Kekuatan militer RRT yang dibangun menjadi masif, mulai dari kapal induk hingga pesawat tempur sampai pagkalan militer (Moxnews.com, 2012). Pembangunan armada militer yang dibangun oleh RRT bahkan menempatkan posisinya sebagai kekuatan militer kedua terkuat di dunia setelah AS. Kapasitas militer RRT didukung oleh cadangan devisa dan sumber daya yang yang besar. Anggaran militernya dinaikkan untuk menguatkan kekuatan militer yang dimiliki. Departemen Pertahanan RRT

tahun 2012 memaparkan anggaran militer RRT mencapai 670,27 miliar yuan (sekitar Rp.65triliun) yang berarti meningkat sebesar 11,2% atau 67 miliar yuan (sekitar Rp. 96,5 triliun) dari anggaran tahun sebelumnya. Anggaran Departemen Pertahanan RRT merupakan yang terbesar kedua di dunia yang hanya terpaut 4,8% dari anggaran militer AS. Dengan populasi penduduk sebesar 1,3 miliar jiwa dengan tentara aktif sebanyak 2.255.000 orang. Kemudian tentara cadangannya mencapai 800.000 orang dan para militer aktif sebanyak 3.969.000 orang (Lisbet, 2012).

Memahami posisinya yang begitu kuat serta kedaan sumber daya yang dimiliki, pengaruh RRT terhadap Indonesia dimulai dari perhitungan bisnis yang disebutnya sebagai *oil diplomacy*. Seperti masuknya perusahaan RRT NOCs yang masuk ke Indonesia kiranya dituntun oleh motif keuntungan dan merasa bahwa Indonesia sekarang dalam keadaan yang cukup stabil dengan resiko yang rendah (Wibowo & Hadi, 2009). Dari sudut pandang politik, RRT dapat menarik keuntungan politik dari negara-negara yang menentang hegemoni Amerika Serikat. Disamping itu, masuknya pengaruh RRT ke Indonesia disadari oleh RRT bahwa Indonesia tetap memainkan peranan sentral di Kawasan Asia Tenggara, terutama ASEAN. Indonesia yang merupakan negara dengan berpenduduk ke-5 terbesar di dunia. Kemudian juga keadaan ekonomi yang begitu stabil memungkinkan banyak negara yang berebut pengaruh di Indonesia.

Kekuatan militer RRT mengancam keamanan regional termasuk di Asia Tenggara, seperti klaim RRT di Laut Tiongkok Selatan yang akan merugikan Indonesia, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam dan Malaysia. Bahkan Amerika Serikat yang memang memiliki kepentingan atas teritorial laut Tiongkok Selatan turut serta dalam konflik batas wilayah ini. Secara geopolitik posisi Pulau Spratly memang sangat strategis karena dapat memberikan banyak keuntungan, baik dari aspek politik dan pertahanan maupun dari segi ekonomi (Djuyandi, 2016).

Apabila kepulauan di Laut Tiongkok Selatan dikuasi RRT, maka secara batas wilayah mereka akan bertambah namun bagi negara di kawasan Asia Tenggara klaim ini akan menyebabkan banyak lagi kapal-kapal RRT yang melanggar batas wilayah negaranya.

Kepulauan Spratly yang terletak di garis pantai utama Asia, membentang sampai sebelah barat laut Asia, memiliki kekayaan laut berupa tambang mineral bawah laut dan ikan yang berlimpah. Perkiraan sebanyak 11 miliar barel minyak dan 5,4 triliun meter kubik gas alam terdapat diperaian ini yang belum tereksplorasi. Pangkalan angkatan laut dan angkatan udara beberapa negara ASEAN banyak yang termotivasi oleh kepentingan atas kontrol laut China Selatan ini. Jika AS meninggalkan pangkalan Subic dan Clark (Filipina), maka persepsi atas ketidakseimbangan kekuatan regional akan berpengaruh terhadap cita-cita ASEAN (Djelantik, 2015).

Namun di sisi lain, kekuatan RRT di sektor ekonomi membuat rezim Jokowi melirik RRT sebagai suatu yang menguntungkan dalam mempertahankan dan meningkatkan ekonomi Indonesia. Keberhasilan RRT dalam dominasi ekonomi menjadi peluang Indonesia untuk bisa menaikkan komoditas perdagangannya (Tirto.id, 2016). Di saat yang bersamaan defisit anggaran yang dialami Indonesia serta cadangan devisa yang terus menipis membuat pemerintahan Jokowi harus bisa memanfaatkan RRT sebagai mitra setrategis dalam menaikkan ekonomi dan infrastruktur. Kerja sama Indonesia-RRT dalam bidang infrastruktur bisa membantu Indonesia dalam menutupi defisit anggaran pembangunan yang dicanangkan Jokowi. Disamping itu, RRT yang ingin menjadi salah satu negara adidaya akan memanfaatkan kerja sama ini sebagai suatu peluang merebut pengaruh Amerika Serikat di Indonesia. Dengan demikian, RRT semakin menunjukkan dominasi ekonominya di kawasan Asia Tenggara terutama di Indonesia yang memiliki berbagai sumber kekayaan alam yang strategis.

Kerja sama yang dilakukan dengan RRT menimbulkan permasalahan serius bagi Indonesia. Hal ini berkaitan dengan ekspansi tenaga kerja RRT yang datang ke Indonesia. Terutama yang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh RRT, seperti pembangunan Kereta api cepat Bandung-Jakarta, pelabuhan, jembatan, dan sebagainya. Kedatangan TKA ilegal asal RRT meningkatkan kondisi ironis di saat Indonesia pun mengalami masalah angka pengangguran yang cukup besar.

Dari aspek ideologi, latar belakang RRT yang identik dengan komunisme juga menjadi persepsi ancaman bagi Indonesia yang memiliki

sejarah suram dengan PKI. Menurut Soesastro (2008), infiltrasi kekuatan modal RRT saat ini telah membawa kekhawatiran terhadap ancaman komunis. Hal ini menimbulkan pro dan kontra pada elit politik di Indonesia sejak lama. Oleh sebab itu terjadi penentangan terhadap rezim Jokowi, yang disebabkan oleh pemerintahan Jokowi yang dianggap pro terhadap RRT. Penolakan tersebut dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik yang memainkan situasi ini untuk bisa menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Mereka bisa membaca situasi bahwa kekuatan pemerintah bisa dibenturkan dengan kekuatan kaum agamis yang memiliki basis massa dari rakyat mayoritas. Dengan demikian, benturan antara kaum agamis dengan rezim Jokowi merupakan suatu yang menjadi sasaran empuk bagi permainan politik bagi mereka yang menjadi oposisi pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan strategi politik yang dilakukan oleh oposisi pemerintah akan menggunakan isu komunisme dan ancaman RRT yang menghadapkan kelompok-kelompok Islam dengan pemerintahan Jokowi.

SIMPULAN

Sentimen agama masih menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Setelah reformasi 1998, politik aliran kembali menguat yang ditandai terbentuknya konfigurasi partai-partai yang menjurus pada pembelahan ideologi yang berlaku pada periode Orde Lama, yaitu nasionalis-sekular, nasionalis, dan Islam. Kategorisasi ideologi tersebut mengundang perdebatan, terlebih partai-partai bergerak dinamis dan cair dalam bekerja sama dan menggalang dukungan. Karena itu, memasuki pemilu 2004 pola pengelompokan partai pada ajang Pilpres tidak mencerminkan batasan-batasan ideologi. Demikian pula dengan pemilu 2009, kerja sama antarpartai tidak mencerminkan pengelompokan ideologi, tetapi cenderung mengutamakan asas kepentingan atau pragmatisme politik. Namun, meskipun partai-partai berupaya meluaskan pendukungnya dari konstituen tradisionalnya dan cara-cara kampanye canggih semakin mendominasi, gejala politik aliran ternyata tidak benar-benar habis setidaknya di tingkat basis massa.

Keberhasilan PDIP mengantarkan kadernya, Jokowi, sebagai presiden dan menjadi partai utama pemerintah ternyata turut

membangkitkan kembali sentimen agama melawan komunis. Pada tataran organisasional, tidak tampak adanya pembelahan dan pengelompokan baik atas dasar ideologi maupun basis massa. Jokowi-Jusuf Kalla membangun pemerintahannya bersama-sama dengan sebagian besar partai. Partai-partai Islam seperti PPP, PKB, dan PAN turut serta dalam jajaran kabinet pemerintah. Namun, pertentangan ideologi justru semakin kuat di luar ranah politik institusional. Pemicunya adalah peristiwa dugaan penistaan agama oleh Ahok yang dikenal dekat dengan Jokowi. Di saat yang bersamaan, menguatnya posisi RRT dalam kancah politik global memaksa Indonesia (dan juga negara-negara di Asia Tenggara lainnya) menjalin kerja sama terutama pada bidang ekonomi. Semakin kuatnya pengaruh RRT dengan investasi besar-besaran disertai isu-isu negatif lain, seperti penguasaan proyek infrastruktur dan serbuan tenaga kerja asing ilegal. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan, khususnya di kalangan kelompok Islam, tentang bayang-bayang kebangkitan PKI. Aksi demonstrasi besar-besaran yang disertai isu ideologi telah meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi friksi ideologis antara nasionalis-sekular dengan Islam. Pasca 2014, pola politik aliran kembali menjadi lintasan konflik ideologis yang membelah basis massa pendukung dan mempengaruhi dinamika keamanan nasional. Hasil kajian ini merupakan analisis awal yang perlu didalami lagi untuk mengungkapkan bagaimana indikasi-indikasi menguatnya politik aliran dapat membentuk polarisasi kekuatan politik dan membentuk ulang demokratisasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antarnews.com. (2015, April 4). Jokowi kunjungi pondok pesantren di Solo - ANTARA News. Retrieved April 13, 2017, from <http://www.antarnews.com/berita/489021/jokowi-kunjungi-pondok-pesantren-di-solo>
- Aspinall, E. (2010). INDONESIA IN 2009: Democratic Triumphs and Trials. *Southeast Asian Affairs*, 103–125.
- Azra, A. (2004). Indonesian Islam, Election Politics and Beyond. *Nyasnytt Asia Insight*, (4). Retrieved from <http://>

- nias.ku.dk/sites/default/files/files/NIASnytt-screen.pdf
- Detik.com. (2016, Desember). Polri: Penangkapan Sri Bintang Terkait Dugaan Makar Bukan karena Surat Semata. Retrieved April 13, 2017, from <http://>
- Djelantik, S. (2015). *Asia Pasifik: Konflik, Kerjasama, dan Relasi Antarkawasan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djuyandi, Y. (2016). Pelanggaran Laut RRT Selatan. <http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2016/03/31/pelanggaran-di-laut-china-selatan-365474>. diakses tanggal 12 Maret 2017.
- Eklof, S. (2004). *Power and Political Culture in Suharto's Indonesia: The Indonesian Democratic Party (PDI) and the Decline of the New Order (1986-98)*. London: Routledge.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Geertz, C. (1976). *The Religion of Java*. University of Chicago Press.
- Ghoshal, B. (2004). Democratic Transition and Political Development in Post-Soeharto Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 26(3), 506–529.
- Hamayotsu, K. (2015). Indonesia in 2014: The Year of Electing the “People’s President.” *Asian Survey*, 55(1), 174–183. <https://doi.org/10.1525/as.2015.55.1.174>
- Herdiansah, A. G. (2015). *Paradoks Koalisi Tanpa Syarat: Suatu Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Inayatullah, B. (2009). Partai Islam: Jalan Terjal Menuju Kemenangan. In *Indonesia 2008*. Jakarta: The Indonesian Institute.
- Inilah.com. (2016, November 1). Ini Daftar Ormas dan Tokoh Ikut Demo 4 November. Retrieved April 13, 2017, from <http://nasional.inilah.com/read/detail/2335680/ini-daftar-ormas-dan-tokoh-ikut-demo-4-november/>
- Jaques, M. (2011). *When China Rules the World (Ketika RRT Menguasai Dunia): Kebangkitan Dunia Timur dan Akhir Dunia Barat*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Kini.col.id. (2016, November 21). Kapolri Sebut Aksi Bela Islam III Makar, Akan Tindak Tegas Jika Tetap Digelar. Retrieved April 13, 2017, from <http://nasional.kini.co.id/2016/11/21/18568/kapolri-sebut-aksi-bela-islam-iii-makar-akan-tindak-tegas-jika-tetap-digelar>
- Kompas.com. (2016, June 13). Jokowi Teken Perpres Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Retrieved April 13, 2017, from <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/13/13131131/jokowi.teken.perpres.pendirian.universitas.islam.internasional.indonesia>
- Mietzner, M. (2009). *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Moxnews.com. (2012, Desember). 2030, Kiblat Ekonomi Dunia Bergeser ke China. Retrieved April 13, 2017, from <http://www.monexnews.com/world-economy/2030-kiblat-ekonomi-dunia-bergeser-ke-china.htm>
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2009). Muslim Indonesia’s Secular Democracy. *Asian Survey*, 49(4), 575–590. <https://doi.org/10.1525/as.2009.49.4.575>
- NUOnline. (n.d.). PBNU Tentang Wacana Penghapusan Kolom Agama di KTP | NU Online. Retrieved December 3, 2016, from <http://www.nu.or.id/post/read/52783/pbnu-tentang-wacana-penghapusan-kolom-agama-di-ktp>
- Okezone.com. (2015, Agustus). Delapan Fakta Kekuatan China di Pusaran Ekonomi Dunia. Retrieved April 13, 2017, from <http://economy.okezone.com/read/2015/08/27/213/1203767/delapan-fakta-kekuatan-china-di-pusaran-ekonomi-dunia>
- Pepinsky, T. B., Liddle, R. W., & Mujani, S. (2012). Testing Islam’s Political Advantage: Evidence from Indonesia. *American Journal of Political Science*, 56(3), 584–600.
- Pusat Penelitian Politik LIPI. (2004). *Year Book 2004: Quo Vadis Politik*

- Indonesia?* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Republika.co.id. (2017a, January 24). Trump Tarik Keanggotaan dari TPP, Cina Bisa Rebut Dominasi AS? Retrieved April 13, 2017, from <http://republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/17/01/24/ok9up7382-trump-tarik-keanggotaan-dari-tpp-cina-bisa-rebut-dominasi-as>
- Republika.co.id. (2017b, January 31). Ketua MUI Ungkap Proses Penerbitan Fatwa Ahok Menista Agama. Retrieved April 13, 2017, from <http://republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/31/okmtmw382-ketua-mui-ungkap-proses-penerbitan-fatwa-ahok-menista-agama>
- Singh, B. (2003). The 2004 Presidential Elections in Indonesia: Much Ado about Nothing? *Contemporary Southeast Asia*, 25(3), 431–448.
- Tempo.Co. (n.d.). 7 Kader NU Bantu Presiden, Pasrah kepada Jokowi | politik | tempo.co. Retrieved December 3, 2016, from <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/18/078666922/7-kader-nu-bantu-presiden-pasrah-kepada-jokowi>
- Tirto.id. (2016, July 19). Indonesia Merapat ke Cina. Retrieved April 14, 2017, from <https://tirto.id/indonesia-merapat-ke-cina-btyi>
- Tribunnews.com. (2014, June 25). Jokowi Menjawab Fitnah. Retrieved April 14, 2017, from <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/25/jokowi-menjawab-fitnah>
- Tribunnews.com. (2016, October 14). Didemo FPI, Ahok: Demo Hak Semua Orang. Retrieved January 6, 2017, from <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/10/14/didemo-fpi-ahok-demo-hak-semua-orang>
- Ufen, A. (2006). Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and 'Philippinisation'. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=977982
- Wardaya, F. X. B. T. (2009). *Membongkar Supersemar: dari CIA hingga kudeta merangkak melawan Bung Karno*. Yogyakarta: Galangpress Group.
- Wardhana, V. S., Manan, A., & Atmadja, I. S. (2001). *Geger santet Banyuwangi*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Watson, B. (2004). Muslim Politics and the Coming Election in Indonesia. *Anthropology Today*, 20(2), 22–24.